

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya daerah-daerah Indonesia, maka dibentuklah provinsi baru pada tahun 2012 yaitu Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34. Kalimantan Utara merupakan pemecahan dari Kalimantan Timur. Saat ini Kalimantan Utara masih tergolong provinsi termuda karena masih dalam proses pemekaran sumber daya manusia. Kalimantan Utara memiliki 4 Kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan atau nama lain nya adalah Tanjung Selor.

Pemimpin merupakan figur yang terpenting ada disuatu daerah maka bawahan akan mengikuti cara pemimpin bekerja, sangat aneh jika terjadi pemimpin yang tidak dipanuti oleh bawahan maupun masyarakat yang ada disuatu daerah tersebut, dalam hal ini pemimpin harus dipilih yang bisa membuat suatu daerah merasa menjadi lebih maju. Seorang pemimpin adalah seorang nahkoda disuatu kapal, sehingga kemanapun kapal tersebut mencapai tujuannya tentu ditentukan oleh pemimpinnya.

Pemilihan umum menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu Negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Hal utama didalamnya adalah

tercapainya pemerintahan yang didasarkan pada konsep pemilahan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum kepala daerah harus dilaksanakan dengan jujur, adil dan damai. Salah satunya prinsip yang terpenting adalah pengakuan dari perbedaan dan penyelesaian secara damai.

Dua pasangan calon telah melakukan kampanye secara damai dan mengikuti aturan hukum, namun dalam penghitungan suara dinyatakan bahwa dari pasangan yang kalah merasakan tidak menerima atas penghitungan suara tersebut karena pasangan tersebut merupakan orang yang telah berjuang untuk provinsi terbaru ini, dan merupakan putera daerah dari provinsi Kalimantan Utara ini atau yang dimaksud oleh pribumi.

Pada tahun 2015 adalah PEMILUKADA gubernur yang pertamakali dilakukan di Kalimantan Utara, karena pada tahun 2014 baru saja dibentuk provinsi terbaru ini. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada periode 2015-2020 yang berjumlah 9 partai yakni dari Partai HANURA, Partai NASDEM, PKB, PKPI, PDI-P, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PBB.

Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia dan provinsi ke-34 di Indonesia dimana dalam PEMILUKADA yang pertama kali ini hanya ada dua pasangan calon yang mengikuti pemilihan gubernur yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015, artinya adalah persaingan semakin ketat karena dari dua

pasangan calon tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pengalaman di dunia politik yang kuat.

Pemilukada Kalimantan Utara pada tahun 2015 ini dihelat di lima daerah, yakni Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan dan Tana Tidung. Pemilukada diikuti oleh dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Jusuf SK-Marthin Billa dan Irianto Lambrie-Udin. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan cepat yang dilakukan kubu tim pasangan tersebut, perolehan suara Irianto-Udin mencapai 53,67% suara. Sementara, kubu pasangan Jusuf SK-Marthin Billa mengumpulkan 45,86% suara. (Sindonews.com/Awaluddin Jalil)

Namun dalam berlangsungnya pesta demokrasi pertama kali dalam pemilihan gubernur ini mendapatkan hal yang tidak biasa terjadi dalam pemilukada lain nya, karena setelah proses pemungutan suara berlangsung dan kemudian melakukan perhitungan suara yang di peroleh antar Cagub-Cawagub muncul ganjalan kepada pihak yang kalah. Pihak kalah adalah dari pihak pribumi, dimana dinyatakan kalah dalam pesta demokrasi ini dan mengaku adanya kecurangan atas penghitungan suara tersebut. Massa pendukung dari pribumi menolak atas kekalahan yang dialami dan melakukan unjuk rasa dengan menuntut secara langsung kepada KPU. Pada akhirnya pihak yang kalah berakibat pada unjuk rasa, awal nya unjuk rasa berlangsung dalam kondisi hukum namun pada akhirnya terjadi kerusuhan yang membuat mobil dinas dari gubernur dibakar bahkan massa membakar

kantor gubernur. Hal ini sangat fatal di lakukan karena fasilitas umum menjadi rusak parah dan tidak bisa di gunakan dalam waktu yang dekat.

Dilakukan unjuk rasa penolakan dikarenakan tidak menerima adanya kepemimpinan dari non pribumi tersebut. Massa dari pendukung pribumi mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi kepala daerah adalah putera daerah asli yang mengerti dengan daerahnya sendiri, namun kenyataannya yang terpilih adalah dari figur pendatang. Dan massa pendukung dari pihak pribumi mengatakan adanya kecurangan yang diakibatkan *money politic*.

Unjuk rasa menolak penetapan pasangan calon gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie-Udin Hianggio oleh KPU setempat, berakhir anarkis. Massa pendukung pasangan yang kalah, Jusuf SK-Marthin Billa, merusak dan membakar bangunan Badan Kepegawaian Daerah Pemrov Kaltara. Dua unit mobil dibakar. (TribunKaltim.co/Budi Susilo)

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana Indonesia sendiri masih sering mengalami masalah konflik dan kekerasan bernuansa etnik yang masih sering terjadi, ini adalah salah satu contoh masih eksisnya masalah identitas etnik. Padahal, di balik dengan berkembangnya masyarakat Indonesia ini terdapat kekuatan modal yang mengikat yaitu sosial, ekonomi, simbolik, dan budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain, namun masih saja sering terjadi hal politik identitas, dimana etnis selalu dibawa ke dalam dunia politik. (Sjaf, 2014)

Secara sosiologis, hal ini wajar dilakukan karena seperti halnya konflik yang pernah terjadi pada Ahok, dimana ia menjadi calon gubernur Jakarta pada itu namun ia kalah dikarenakan dituduh melakukan penistaan agama, maka hal politik identitas di Indonesia masih sangat kental dan bisa terjadi, sama seperti halnya di Kalimantan Utara yang masih kental dengan etnistas.

Dalam politik tidak ada kawan yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Sebagaimana kita ketahui, jabatan gubernur mempunyai kekuasaan yang besar baik di bidang politik, pemerintahan, hukum, administrasi maupun ekonomi. Oleh karena itu, jabatan ini di perebutkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melupakan arti kemanusiaan, nasionalisme, cinta kasih dan lain-lain yang di anjurkan oleh agama, bahkan sentimen agama ikut mewarnai perpolitikan.

Dengan demikian penulis memilih judul **“Faktor Penolakan Masyarakat Pribumi Pada Kepemimpinan Pendetang Pada Pilkada Kalimantan Utara Tahun 2015”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat pribumi belum dapat menerima kepemimpinan dari figur pendatang dalam pilkada di provinsi Kalimantan Utara tahun 2015?

2. Bagaimana memunculkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang di Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat pribumi belum dapat menerima kepemimpinan dari figur pendatang dalam pilkada di provinsi Kalimantan Utara tahun 2015?
2. Untuk mengetahui bagaimana memunculkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang di Provinsi Kalimantan Utara?

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pentingnya mengapa masyarakat pribumi belum dapat menerima kepemimpinan dari figur pendatang dalam pilkada di provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dan mengetahui bagaimana memunculkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan terhadap pentingnya mengapa masyarakat pribumi belum dapat menerima kepemimpinan dari figur pendatang dalam pilkada di provinsi

Kalimantan Utara tahun 2015 dan mengetahui bagaimana memunculkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang di Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hasil dari penelitian ini untuk menambah referensi mengenai pentingnya mengapa masyarakat pribumi belum belum dapat menerima kepemimpinan dari figur pendatang dalam pilkada di provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dan mengetahui bagaimana memunculkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang di Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Bagi Masyarakat, Memberikan pengetahuan dan wawasan terdalam mengenai pentingnya mengetahui mengapa masyarakat pribumi belum belum dapat menerima kepemimpinan dari figur pendatang dalam pilkada di provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dan mengetahui bagaimana memunculkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang di Provinsi Kalimantan Utara.

E. Literature Review

NO	Judul	Penulis	Isi	Kesimpulan
1	Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala	Fikri Adrian (Adrian, 2013)	Sentimen etnis dan agama dalam	Pemilihan kepala Daerah DKI Jakarta

	Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012)		pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012, gambaran sentimen memang selalu melekat pada beberapa pasangan yang mengikuti dalam Pilkada DKI Jakarta.	semakin memanas dikarenakan ramainya isu sentiment suku, agama dan ras (SARA).
2	Dinamika Pemilihan Gubernur Jawa Timur	R. Nazriyah (Nazriyah, 2013)	Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis namun pada Era Reformasi ini banyak terjadi pilkada yang mengakibatkan <i>“money Politic”</i> .	Menurut MK, program kesra harus dijalankan dengan seutuhnya dan bukan kesalahan yang fatal dalam pilkada tersebut.

3	<p>Agama dan Etnisitas</p> <p>Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 2015</p>	<p>Ifansyah Putra</p> <p>(Putra, 2017)</p>	<p>Di Indonesia masih kentalnya pengaruh etnis dalam hal politik.</p>	<p>Kuasa agama dan etnisitas masih sering dilakukan sebagai strategi kemenangan, tapi dalam penggunaannya.</p>
4	<p>Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia</p>	<p>Bungasan Hutapea</p> <p>(Hutapea, 2015)</p>	<p>Jurnal tersebut menjelaskan mengenai rezim pemerintahan di Belanda hingga sejarah keresidenan di Negara Jepang di era pemerintahan Jepang di Indonesia hingga mengenai panggilan atau sebutan dari keresidenan. Adapun mengenai</p>	<p>Jadi, seiring berjalannya perkembangan demokrasi di Indonesia maka membuat tuntunan masyarakat menjadi lebih tinggi. Dan juga sistem pilkada di Indonesia tahun ke tahun berubah karena banyaknya sistem baru yang dibuat menurut Undang-Undang.</p>

			<p>setelah kemerdekaan dan bahkan mengenai era reformasi maupun pemilu menurut Undang-Undang.</p>	
5	<p>Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik (Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara</p>	(Manalu, 2007)	<p>Gerakan sosial bukan lagi hal asing di mata warga Indonesia. Semakin kian meningkatnya banyak gerakan sosial dalam hal mendorong perubahan yang ada dalam kebijakan publik, perubahan politik maupun sosial secara luas.</p>	<p>Jadi, pentingnya ada gerakan sosial di Indonesia dalam hal pengaruhnya perubahan kebijakan publik dan juga gerakan sosial merupakan hal alternatif untuk lebih baik dalam mendesak adanya perubahan kebijakan publik.</p>

6	Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah	(Suharyanto, 2014)	Partisipasi adalah hal suatu penentu sikap dan keterlibatan diri pada individu, partisipasi adalah budaya politik karena adanya bagian budaya politik dalam masyarakat. Dan melihat masyarakat Tionghoa terlibat dalam hal pilkada.	Dalam pilkada yang berlangsung di Kota Binjau tahun 2010 Tionghoa terlibat partisipasi dengan aktif dalam pilkada tersebut. Rasa simpatik terhadap pilkada tersebut sangat tinggi dikarenakan juga mereka ingin yang terbaik memimpin daerah mereka.
7	Etnis Pribumi dan Sosialisme di Amerika Latin	(Akbar)	Dalam jurnal ini membahas mengenai siapa itu yang disebut pribumi di Amerika Latin dan di Amerika Latin pribumi	Dalam pemilu di Amerika Latin ternyata hanya pribumi yang akan menang tanpa adanya proses pemilu lagi.

			menduduki bagian warga miskin maka dalam halnya pemilu dimenangkan oleh masyarakat sosialis saja dan menduduki kekuasaan.	
8	Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)	(Andy Prima Sahalatu, 2018)	Dalam jurnal ini membahas mengenai gerakan pembentukan gerakan politik identitas di DKI Jakarta, pada waktu itu Ahok sebagai calon Gubernur diduga menistakan agama dan membuat warga menjadi dilema dalam	Jadi, politik identitas sangat kental dalam dunia politik. Maka seperti yang dikatakan dalam jurnal tersebut jika dia merupakan etnis dari calon maka dia akan memilih sesuai etnisnya. Seharusnya tidak diperbolehkan membedakan antar

			memilih Cagub DKI Jakarta. Dan pada masa Ahok terancam, kelompok lawan calon dari Ahok juga mencoba mencari sumber golongan yang gampang dimobilisasi untuk memecahbelahkan dan mendapatkan suara lebih banyak.	etnis dalam dunia politik.
9	Orientasi Politik Politisi Etnis Cina di Kota Surabaya Pada Pemilu 2004 dan 2009	(Yusfirlana Nuri Ma'rifah, 2014)	Dimana dalam jurnal tersebut berbicara mengenai wawancara kepada beberapa politikus terkait masuknya etnis cina ke dunia pemilu. Adapun	Adanya ingin berubahnya Undang-Undang yang bersifat diskriminatif.

			<p>banyak argumen yang dituangkan oleh beberapa politikus tersebut. Dan juga berbicara mengenai faktor keikutsertaan dalam dunia politik.</p>	
10	<p>Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan</p>	<p>(Muhammad Saleh Tajuddin, 2016)</p>	<p>Seperti yang kita ketahui banyaknya isu yang bisa memecahbelahkan kelompok karna tersebarnya isu-isu seperti yang ada di jurnal ini, maka dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai penyebab terjadinya isu dari suku hingga</p>	<p>Konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena pengaruh kesenjangan ekonomi.</p>

			agama. Dan disini yang dimaksud dengan Non-Pribumi yaitu dari etnis Cina.	
--	--	--	---	--

F. Kerangka Teori

1. Kekuasaan

a. Sumber kekuasaan

Menurut teori sumber kekuasaan (Adiwilaga, 2018).

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang menggunakan pengaruh pada orang lainnya. Dimana maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu maupun kelompok. Dijelaskan pula bahwa kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang bisa menyebabkan konflik dalam organisasi. Dijelaskan pula dalam teori Max Weber (1958:180) bahwa kekuasaan merupakan kesempatan individu atau kelompok untuk memberi kesadaran masyarakat akan keinginan sendiri. Lebih mendalam lagi, Inu Kencana (2003: 134) mendefinisikan kekuasaan sebagai hasil pengaruh yang diharapkan individu atau sekelompok orang, sehingga dapat merupakan suatu konsep kualitatif dan kuantitatif dikarenakan dapat menghitung hasilnya dan

mendapatkan pengaruhnya atau hasil dari pengaruh itu. Sumber kekuasaan sendiri dapat dilihat dari beberapa perspektif. Menurut JRP French dan Bertram Raven sumber kekuasaan sebagai berikut :

1. *Coercive power*, merupakan kekuasaan yang diperoleh karena sering menunjukkan kekerasan baik dalam kepemimpinannya maupun dalam berbagai kepengurusan. Unsur-unsur yang wajib dipenuhi adalah sering membentak
 2. *Reward power*, merupakan kekuasaan yang diperoleh karena pemberian dari penguasa.
 3. *Legitimate Power*, merupakan kekuasaan yang diperoleh karena mendapatkan surat keputusan, mendapat ijazah, mendapat pengangkatan sehingga sah untuk menjadi pemimpin.
 4. *Reverent Power*, merupakan kekuasaan yang diperoleh karena seseorang mempunyai daya Tarik tertentu, seperti penampilan fisik yang menarik orang lain.
 5. *Expert Power*, merupakan kekuasaan yang diperoleh karena seseorang tersebut memiliki keahlian tertentu sehingga orang lain membutuhkan keahlian, kecerdasan, keterampilan untuk memerintah sebagai awal kekuasaan.
- b. Legitimasi kekuasaan

Legitimasi kekuasaan adalah suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada baik hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta

secara SAH. Legitimasi kekuasaan merupakan seorang pimpinan yang menduduki jabatan tertentu atau memiliki kekuasaan yang bersangkutan melalui pengangkatan sehingga dianggap sah menjalankan kekuasannya. Kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan legal, sah atau sesuai hukum. Kekuasaan sudah sesuai dengan peraturan adat istiadat atau peraturan kebiasaan yang sudah berlaku. Adapun menurut Max weber kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial yang akan melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan dasar kemampuan.

c. Unsur kekuasaan

Menurut Budiardjo unsur kekuasaan meliputi :

1. Kemampuan/ kekuataan/ kepemimpinan
2. Kemauan/keinginan dari kelompok atau lembaga
3. Situasi hubungan sosial
4. Wujud terbentuk keputusan yang membatasi atau memperluas alternative untuk bertindak

d. Cara mendapatkan legitimasi yaitu :

1. Simbolis
2. Memberikan dan menjanjikan cara kesejahteraan materil kepada masyarakat, contoh: fasilitas pendidikan dan kesehatan
3. Menyelenggarakan pemilu untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakilnya atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

e. Faktor penolakan terhadap adanya perebutan kekuasaan

Penolakan terhadap perebutan kekuasaan merupakan fenomena yang timbul dalam proses perubahan. Dalam Yukl (2002) menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan penolakan terhadap perebutan kekuasaan yaitu :

1. Ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan terjadinya perubahan.
2. Kepercayaan bahwa tidak dapat memberikan perubahan apabila orang yang berada dalam sebuah organisasi itu merasa bahwa tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan perubahan.
3. Kepercayaan tidak dapat dilakukan. Proses perubahan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga orang meragukan keberhasilan perubahan.
4. Ketakutan akan gagal individu.
5. Kehilangan status dan kekuasaan merupakan perubahan besar dalam organisasi yang dapat menyebabkan kehilangan kekuasaan adanya perubahan.
6. Penolakan akan berpengaruh ada beberapa orang menolak untuk berubah karena tidak ingin dikontrol oleh orang lain.

2. Konflik

a. Pengertian Konflik

Teori konflik merupakan asumsi dasar bahwa perbedaan pendapat atau kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang sifatnya konfliktual. Dari terciptanya konflik didalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan sosial. Dan kekuasaan juga meliputi akses terhadap sumber daya. Kekuasaan individu dan kelompok berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan. Semakin tinggi kesenjangan maka semakin tinggi timbulnya konflik sosial. Kesenjangan biasa terjadi karena ras, gender, kultur, selera, agama dan lainnya.

Teori konflik Dahrendorf menjadi subjek sebagai perspektif alternative yang dapat digunakan menurut situasi. Ada beberapa model konflik bagi Dahrendorf sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat siapa saja tunduk kepada proses perubahan
2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik social
3. Setiap elemen dalam masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan atas beberapa anggota oleh orang lain

Maka, menurut Dahrendorf konflik yang masih bersifat laten akan berubah menjadi manifes. Dahrendorf mengakui bahwa

masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain.

b. Sebab terjadinya konflik

Ada tiga kategori yang dapat dibedakan mengenai sebab terjadinya konflik menurut Tosi dkk (1986: 473)

1. Karakteristik individu
2. Kondisi umum yang muncul antara individu dan organisasi
3. Desain dan struktur organisasi

Dari karakteristik-karakteristik individu :

1. Nilai-nilai
2. Sikaf
3. Keyakinan
4. Kebutuhan
5. Kepribadian
6. Perbedaan persepsi
7. *Judgment*

Dari kekuatan-kekuatan situasional :

1. Kebutuhan dan derajat interaksi (hubungan)
2. Kebutuhan consensus
3. Saling ketergantungan
4. Perbedaan status
5. Penghalang komunikasi

6. Tanggung jawab yang mendua dan yuridiksi

3. Identitas etnis

- a. Pengertian identitas etnis Phinney (1992) menyatakan bahwa identitas etnis merupakan suatu konstruksi yang kompleks untuk mencakup komitmen dan perasaan yang bersama pada suatu kelompok, evaluasi positif serta keterlibatan dalam aktivitas sosial. Dijelaskan juga identitas etnis suatu identitas sebagai seorang anggota dari sebuah kelompok etnis dan pemikiran persepsi dan perasaan yang dirasakan sebagai dari anggota kelompok. Identitas etnis sebagai konsep diri terbentuk dari hasil pembentukan yang merupakan perkembangan identitas etnis dalam pergerakan individu untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya, perilaku, kepercayaan dan tradisinya (Chave dan Guido-dibrito, 1999). Pemahaman etnis dapat melalui secara eksternal dan internal dimana masing-masing individu menempatkan diri sebagai sebuah komunitas secara internal dengan menggunakan pikiran dan perasasaan, secara eksternal menyesuaikan tingkah laku (Jenkims, 1996).

Secara eksternal identitas etnis meliputi :

- i. Penggunaan bahasa tertentu
- ii. Melakukan tradisi-tradisi etnis
- iii. Perpartisipasi dalam jaringan etnis personal
- iv. Keterlibatan dalam kegiatan secara internal

Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas etnis :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi identitas etnis diantaranya :

1. Peer (Teman sebaya)

Merupakan faktor yang mempengaruhi identitas etnis yang menunjukkan bahwa hubungan pertemanan dari etnis yang sama secara actual menunjukkan komitmen dan eksplorasi yang signifikan pada remaja dengan latar belakang yang sama.

2. Tempat tinggal

Area atau tempat tinggal juga merupakan faktor yang mempengaruhi identitas etnis. Tempat tinggal juga digunakan untuk melihat jumlah atau proporsi dari anggota kelompok etnis yang sama.

3. Kelompok sosial

Partisipasi dalam klub-klub etnis misalnya menampilkan diri mereka dan perilaku berbeda (Markus, 1993) menunjukkan bahwa individu mengevaluasi diri tergantung pada hubungan dimana mereka bereaksi.

Dalam menentukan politik identitas, menurut Castells harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentuk identitas, yaitu:

- a. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
- b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.
- c. *Project identity* atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.

G. Definisi Konseptual

Untuk membahas topik penulis tentang “Faktor Penolakan Masyarakat Pribumi Pada Kepemimpinan Pendetang Pada Pilkada Kalimantan Utara Tahun 2015”. Pertama-tama penulis ingin meletakkan dasar apa dan bagaimana faktor dari Penolakan masyarakat pribumi, sebagaimana kita ketahui obyek forma ilmu politik adalah kekuasaan sedangkan kekuasaan ketika bentrok tidak menutup kemungkinan munculnya kerusuhan.

Dalam politik muncul identitas berdasarkan kesukuan, keagamaan, almamater yang secara keseluruhan di kenal sebagai SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Khususnya untuk pemilihan gubernur Kalimantan Utara tahun 2015 di temukan kubu pribumi dan pendatang.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran variable penelitian. Untuk lebih jelasnya definisi operasional penulis cantumkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	K/W
1	Kekuasaan	<ul style="list-style-type: none">- Coercive- Reward- Legitimate- Reverent- Expert	<ul style="list-style-type: none">K₁/W₁K₂/W₂K₃/W₃K₄/W₄K₅/W₅

	Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Beda Pendapat - Untung dan Rugi 	<p>K₆/W₆</p> <p>K₇/W₇</p>
2	Identitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kesamaan suku - Kesamaan agama - Kesusaian Politik - Kesusaian ekonomi 	<p>K₈/W₈</p> <p>K₉/W₉</p> <p>K₁₀/W₁₀</p> <p>K₁₁/W₁₁</p>

Yang dimaksud dengan *K* adalah Kuesioner dan *W* adalah Wawancara.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode deskriptif kualitatif yaitu melukiskan keadaan di lapangan apa adanya sebagaimana di nyatakan oleh Suharsimi Arikunto sebagai berikut :

“Deskriptif awalnya berasal dari bahasa Inggris yang mengatakan bahwa *to describe* yang artinya adalah menjelaskan sesuatu hal. Contohnya keadaan, situasi, peristiwa dan lain-lain. Dengan itu yang di maksud penelitian deskriptif adalah menyelidiki sesuatu keadaan, kondisi, situasi dan peristiwa ataupun hal lainnya, yang hasilnya akan di paparkan dalam sebuah laporan penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang paling mudah atau disebut penelitian sederhana di bandingkan dengan penelitian lainnya. Karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa dalam objek atau wilayah yang diteliti. Dalam penelitian ini bermaksud bahwa peneliti tidak menambah, mengubah atau mengadakan manipulasi pada objek atau wilayah yang diteliti, kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan secara apa adanya tanpa dilebihkan.”

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lingkup Provinsi Kalimantan Utara lebih tepatnya di Kabupaten Bulungan

1. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari pihak pertama yang sifatnya cenderung lebih subyektif karena bersifat pendapat pribadi yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah diolah oleh pihak ketiga, yang dikumpulkan oleh peneliti dari jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara tertulis dengan observasi langsung dilapangan.

a. Kuesioner

Kuesioner penulis berikan kepada responden dan responden memilih salahsatu jawaban dari :

a. Sangat Tinggi

b. Tinggi

c. Biasa saja

d. Rendah

e. Sangat rendah

Setiap jawaban pertanyaan tidak diberikan nominal, tetapi penulis menghitung berapa banyak responden memilih tingkat jawaban tertentu untuk kemudian dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara penulis jadikan pelanjut kuesioner untuk mengetahui apakah responden setuju dan atau mengapa memilih tingkat jawaban tertentu.

c. Observasi

Setiap kejadian dilapangan akan penulis catat tanggal, bulan dengan segala persoalan dan jalan keluarnya.

Dengan begitu penulis mengetahui sebab-musabab terjadinya kerusuhan di Kalimantan Utara mulai dari provokatornya, para pendukungnya, dan orang-orang yang terlibat mengatasnamakan suku, agama, kedaerahan dan kebiasaan lainnya.

d. Responden

Dalam penunjukan responden serta mengambil sample, penulis memakai purposive sampling, karena jumlah yang penulis pakai sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel responden penulis sampaikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Responden

No	Responden	Jumlah
1	Pendukung Nomer 1 a. Partai Politik b. Masyarakat Pendukung	15
2	Pendukung Nomer 2 a. Partai Politik b. Masyarakat Pendukung	15
3	Pemerintahan a. Kantor Gubernur b. Polres c. Satpol PP	15
	Jumlah	45

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk memilah-milah data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara dan observasi agar menjadi kesatuan yang dapat dikelola serta mencari apa yang penting dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan analisis dimana penulis mengungkapkan makna dari suatu informasi baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis.